

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang bersifat demokrasi, nilai-nilai demokrasi sudah menjadi budaya sendiri sejak lama, dan sampai saat ini semangat demokrasi menghiasi setiap perjalanan bangsa ini. Dalam hal ini demokrasi yang bersifat sebagai pengejawantahan manusia untuk bebas dalam hal apapun sesuai dengan norma dan undang-undang yang berlaku. Demokrasi juga ditempatkan kepada kedaulatan rakyat yang bersifat mutlak. Salah satunya demokrasi elektoral sebagai alat untuk pengikisan terhadap demokrasi liberal.

Dalam hal ini politik electoral atau disebut Pemilu sendiri terdiri dari beberapa instrument salah satunya partai politik yang dipergunakan untuk penyalur aspirasi rakyat. Dalam pembentukannya, partai politik berazaskan pada hak asasi dan menjamin konstitusional dalam perwujudan hak setiap orang dan diakui kemerdekaannya oleh Negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 UUD 1945 berbunyi negara menjamin masyarakat untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya.

Pemilu legislatif tahun 2019 adalah pemilu serentak yang diadakan pertama sekali dalam sejarah perjalanan politik elektoral di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Pemilu ini langsung mengadakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sekaligus memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota.

Pada pemilu legislatif 2019 banyak bermunculan calon legislatif *non incumbent* untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif khususnya

pada tingkat Provinsi. Dengan banyak caleg *non incumbent* yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, khususnya di DPRD Provinsi Sumatera Barat mengakibatkan adanya persaingan yang ketat antara calon legislatif *Incumbent* dengan calon legislatif *non incumbent* dalam upaya meraih dukungan dan suara dari para pemilih pada pemilu legislatif DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2019.

Selain itu juga sistem pemilu proporsional ini juga menuntut dan mempengaruhi kandidat dalam tiga cara: (1) mereka dipaksa bersaing melawan rival internal partai guna mendapatkan *personal votes* (suara personal); (2) karena persaingan internal, mereka mau tidak mau mengandalkan jejaring personal ketimbang struktur partai; dan (3) karena sistem ini mengandaikan caleg dengan suara terbanyak yang meraih kursi, mereka hanya perlu mengantongi “segelintir” suara untuk mengalahkan saingan internal. (Muhtadi 2019:18)

Menurut Synder (Venus 2004: 76) seharusnya *political strategic* (strategi pemilu) harusnya dapat di implemtasikan dalam strategi kampanye. Baik itu dipakai media-media yang bisa dipakai untuk mempromosikan kandidat yang akan berkontestasi. Sementara dalam mengurai kegiatan kampanye maupun aktivitas dalam menggiring opini seharusnya terorganisir dan dapat diarahkan secara mengarah kepada khalayak ramai dalam periode waktu tertentu agar tercapai maksud dan tujuan dari kandidat. Sementara dalam mengurai kegiatan kampanye seharusnya serangkaian aktivitas komunikasi dapat menciptakan beberapa pesan yang berkelanjutan di setiap rentang waktu agar bisa diingat oleh setiap konstituten (Roger dan Storey, 1987: 143). Setidaknya ada beberapa unsur

dalam kegiatan kampanye menurut Venus (2004: 76) di antara lain yaitu difokuskan untuk membuat efek/dampak tertentu seperti melakukan penetrasi kepada masyarakat dalam bentuk hal yang bisa berdampak terhadap masyarakat contohnya mengajak goro bersama atau kegiatan sosial bersama, selanjutnya fokus kepada khalayak dengan jumlah sasaran yang besar dan juga difokuskan melalui serangkaian aktivitas komunikasi yang terorganisir berikutnya yang terakhir yaitu terfokuskan dalam kurun waktu tertentu.

Tapi tidaklah cukup bagaimana strategi diatas dijelaskan kalau kurir pesan kandidat tidak maksimal terangkai dengan baik. Kepiawaian figur sangatlah dituntut untuk dapat berkreasi secara maksimal dan piawai menerapkan strategi politik agar tidak berdampak terhadap dinamika politik yang terjadi pada saat itu. Agar kualitas figur lebih menonjol daripada partai yang menyokong kandidat tersebut.

Selanjutnya peneliti melihat adanya *spectrum* lain yang bisa dimanfaatkan oleh kandidat agar dapat memudahkan akses nya ketengah masyarakat. Yaitu menggunakan pendekatan jejaring politik. Peneliti sebelumnya yaitu syaputro Ronaldo (2019) membahas tentang adanya pemanfaatan politik jaringan yang digunakan Lisda Hendrajoni dalam pemilihan legislatif Anggota DPR RI Dapil I Sumatera Barat, bagaimana peneliti melihat bahwa adanya aktivitas jaringan politik yang diarahkan kepada kelompok jaringan yang sudah di bentuk sebelum pemilihan legislatif dilaksanakan. Hal ini memudahkan kandidat untuk memobilisasi atau mengkampanyekan dirinya sebagai calon anggota legislative, ditambah lagi jaringan yang dimiliki Lisda Hendrajoni sendiri juga adalah rintisan

dari jaringan yang di pakai suaminya ketika maju pada Pemilihan Kepala Daerah di Pesisir Selatan.

Pemanfaatan modal sosial juga disinggung oleh Kurniawati Dwi Hastuti (2018) yaitu temuannya meliputi pemanfaatan modal sosial melalui actor-aktor kunci yang memiliki kunci jaringan setiap elemen kelompok, selain itu kandidat juga memiliki peran sentral dalam merajut maupun membangun jaringan politik selama 10 tahun, tetapi dalam penelitian ini objek penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada tataran jaringan keluarga melalui ikatan keluarga yang dibangun oleh kandidat sendiri.

Akses pemanfaatan jaringan politik yang akan diteliti oleh Peneliti yaitu bagaimana seorang anak muda yang tidak memiliki modal yang besar secara *cost* maupun fasilitas publik dan juga kendaraan politik yang *track record* nya selama pemilu dilaksanakan sangat minim mengirimkan kandidatnya di parlemen malah mampu menduduki sebuah kursi Parlemen. Daerah Pemilihan Sumbar II terdiri dari Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman merupakan salah satu daerah di Indonesia yang menjadi tempat dilaksanakannya pemilihan umum serentak legislatif periode 2019-2024, khususnya pada pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Menurut KPU Sumatera Barat, daftar pemilih tetap (DPT) pemilu legislatif 2019 di dapil Sumbar II ini tercatat 375.510, lalu DPT tambahan (DPTb) tercatat 4.199 dan daftar pemilih khusus (DPK) tercatat 7.884, jadi total keseluruhan 387.593. Dari hasil rekapitulasi pengguna hak pilih di dapil Sumbar II ada 269.314 pengguna hak pilih. Dari data yang penulis dapat di Kantor KPU Sumatera Barat pemilu serentak tahun 2019 diikuti oleh 14 Partai Politik dengan

perolehan suara tertinggi sampai terendah.

Ketatnya peta persaingan pada pemilu legislatif DPRD Provinsi Sumatera Barat 2019, khususnya di Dapil II Sumatera Barat (Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman), membuat Firdaus dan tim harus bekerja ekstra keras. Selain itu sebagai calon legislatif non incumbent yang belum punya pengalaman dalam dunia politik, Firdaus tentu harus melakukan strategi jitu dalam pemenangan nya. Diantaranya Firdaus yang merupakan sosok muda yang punya pengalaman dalam hal bidang sosial kemasyarakatan tentunya itu jadi salah satu modal penting dalam misi meraih kemenangan dirinya. Sosok Firdaus dikenal sebagai orang yang sederhana.

Kandidat berasal dari keluarga yang tidak berkecukupan. Dari remaja Firdaus sudah dituntut menjadi orang yang mandiri. Ini dibuktikan berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan, Firdaus ketika masih sekolah di MAN sempat tinggal di masjid sebagai gharin. Ketika kuliah pun Firdaus dikenal sebagai seorang aktivis kampus seperti menjadi Ketua Umum PMII Cabang Padang, Pengurus Banom (Badan Otonom) Nahdlatul Ulama dan Juga Pengurus di Ikatan Mahasiswa Padang Pariaman (IMAPAR). Bahkan dia pernah pergi mengamen ketika masih kuliah demi untuk melanjutkan kuliah dan membiayai kegiatan organisasi yang dia tergabung.

Firdaus bergabung di Partai Kebangkitan Bangsa, berlatar belakang dari penulisan skripsi Firdaus yang membahas tentang Partai Kebangkitan Bangsa di Sumatera Barat. Kemudian dia menjadi kader dari Partai tersebut. Pada pemilu legislatif 2014 Firdaus sempat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPRD

Kabupaten Padang Pariaman, namun Firdaus belum berhasil meraih kursi di DPRD Kabupaten Padang Pariaman.

Firdaus juga bersaing dengan calon legislatif lain yang berasal dari satu kesatuan partai politik yang sama, yaitu PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Kondisi berikut menuntut agar setiap calon legislatif untuk memperbanyak *personal vote* dengan instrument strategi yang bisa menarik konstituen untuk memilih nya. Selain itu ongkos politik yang sedikit cukup menjadi kendala yang menghambat bagi Firdaus dan tim pemenangan. PKB sendiri selama pemilu dilaksanakan sesudah era reformasi hanya satu orang yang bisa dikirimkan ke parlemen tingkat satu Provinsi Sumatera Barat. Khususnya daerah pemilihan II Sumatera Barat barulah Firdaus yang mampu menembus kursi di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Suara yang di dapatkan PKB di dapil II Sumatera Barat yaitu 16.917 suara. Unggul dari partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang mendapatkan suara sebanyak 16.856 suara. Sedangkan Firdaus sendiri mendapatak sebanyak 4.039 suara unggul dari pesaing terdekatnya Drs Ali Musir yang hanya mendapatkan 3.389 suara.

Penggunaan sistem proporsional terbuka di Indonesia dimulai pada tahun 2009 bahwa setiap kandidat berusaha memaksimalkan instrument-instrumen yang bisa mengangkat suara agar bisa terpilih, strategi dan pemanfaatan jaringan politik juga ikut andil dalam proses pemilu tersebut agar memudahkan untuk mensosialisasikan diri agar mudah dicerna pesan yang akan disampaikan oleh pemilih. Peluang terpilihnya pasangan calon merupakan proses bagian yang kompleks, maka tidak bisa dibilang hanya sebagai nilai dari salah satu faktor

strategi saja, sedangkan kajian yang akan dilakukan pada penelitian kali ini ingin mengeksplorasi relasi seluruh modal yang dimiliki kandidat yang kemudian di akumulasikan jaringan politik guna memastikan suara agar dapat terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Dalam hal ini jaringan politik yang terbentuk dalam kampanye calon legislatif yaitu menarik simpul jaringan yang pernah dibangun selama ini, dengan melakukan pemanfaatan jaringan tersebut bisa menjadikan *cost* yang besar bisa terminimalisir dengan adanya jaringan politik tersebut. Jaringan politik itu bisa diarahkan kepada jaringan politik non partai dan kedekatan dalam Organisasi masyarakat atau lainnya dan juga lingkaran lainnya yang memiliki massa untuk bisa mendongkrak elektabilitas dengan *cost* yang minim.

Kemenangan Firdaus dalam pemilu legislatif ini didapatkan dari dukungan masyarakat karena Firdaus yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, Firdaus juga dikenal orang yang memiliki jiwa kepemimpinan dan agamais dan juga faktor ketokohan dari Firdaus. Berkat pengalaman kerja dan ketokohan yang dimiliki Firdaus membuat dia dikenal oleh masyarakat. Firdaus berhasil membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Terlebih Firdaus juga dikenal sebagai anak surau di kampung asalnya. Firdaus juga dikenal orang yang sederhana dalam kehidupannya, ia aktif bersosialisasi dengan masyarakat terkait semasa aktivis maupun sebagai tenaga ahli fasilitator desa Kementerian Desa. Selain itu Firdaus juga dikenal sebagai tokoh yang cukup disegani oleh berbagai kalangan baik itu kalangan tua, muda, ibu-ibu karena Firdaus sangat mudah dalam hal bergaul

dengan masyarakat. Firdaus tidak pernah memandang seseorang itu baik itu dari segi jabatan ataupun harta. Oleh karena itu, figur Firdaus cukup dikenal oleh masyarakat.

Modal penting ini yang dimiliki oleh Firdaus, pengalamannya dalam berorganisasi, luasnya jaringan yang dimiliki sangat membantu dalam kemenangan Firdaus. Sebetulnya tidak mudah menembus ketatnya persaingan politik pemilu legislatif DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2019. Biaya politik yang tinggi, mengharuskan caleg didukung oleh modal yang besar. Namun pada pemilu legislatif DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2019, Firdaus hanya menghabiskan puluhan juta untuk membiayai seluruh kegiatannya sepanjang tahapan pemilu 2019.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, peneliti melihat gambaran isu yang dibahas oleh penelitian terdahulu fokus pada kajian strategi politik kandidat saja dan keuntungan figur maupun *cost* yang dimiliki kandidat. Aspek lain yang menurut peneliti perlu diteliti adalah keterlibatan jejaring politik agar dapat meminimalisir kekuatan *cost* dalam pemilu secara tidak langsung dapat mengarahkan atau memobilisasi suara menjadi sebuah lumbung suara yang efektif, dan juga sebagai pesan kepada kandidat yang sama sekali belum pernah menduduki kursi legislatif tersebut.

Peneliti melihat bahwa yang akan diteliti memiliki sebuah instrument yang

menarik untuk diteliti. Dikutip dari perkataan Firdaus:<sup>1</sup>

“...Alhamdulillah masih ada silaturahmi dan jaringan dalam berpolitik praktis tidak berbiaya mahal, justru yang mahal itu adalah bagaimana menjaga dan merawat jaringan dan silaturahmi.”

Ini menjadi pertanyaan bagi peneliti disaat penggunaan sistem proporsional terbuka pada tahun 2019 maka strategi kampanye electoral pun butuh kekuatan *cost* modal yang besar agar bisa memodali para tim maupun kandidat sendiri untuk mendapatkan akses yang baik terhadap pemilih sendiri.

Adanya sebuah narasi oleh Firdaus pada salah satu media online maka penelitian kali ini peneliti mengangkat seorang figur baru politik praktis, yaitu Firdaus yang tampil pada pemilu legislatif tahun 2019 Dapil dua Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman Kota Pariaman. Firdaus terpilih untuk menduduki kursi Anggota Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Barat. Dengan perolehan suara akhir sebanyak 4.039, dengan rincian suara per-wilayah yaitu di Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 3770, Kota Pariaman 269 suara. Dengan perolehan suara sebanyak itu Firdaus menduduki suara tertinggi dari suara kandidat lainnya yang berada disuatu partai. Dengan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di dapil dua Sumatera Barat sebanyak 16.917 suara.

Berlatar belakang seorang aktivis muda Sumatera Barat, Firdaus sudah memiliki jenjang karir yang cukup baik sebelum mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif pada pemilu legislatif 2019. Diantaranya yaitu tahun 2011-2013 menjadi tenaga fasilitator desa dalam program percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah tertinggal (P2SEDT), tahun 2013-2015 sempat menjadi Reporter

---

<sup>1</sup> Lihat Tribunsumbar.com, Firdaus dan Muhayatul Caleg Jadi, Pembuktian The Power of Silaturahmi (<https://www.tribunsumbar.com/firdaus-dan-muhayatul-caleg-jadi-pembuktian-the-power-of-silaturahmi/>) , di akses Mei 2022

Haluan Sumbar, tahun 2015-2016 menjadi tim asistensi dalam program pemuda sarjana penggerak pembangunan di pedesaan (PSP3), dan tahun 2016-2017 Firdaus diamanahkan sebagai KPW P3MD Provinsi Sumatera Barat sebagai tenaga ahli kaderisasi masyarakat

Peneliti melihat bahwa dinamika keterpilihan Firdaus di Sumatera Barat bisa menjadi penelitian yang baik bagaimana menganalisis keterpilihan Firdaus pada pemilihan umum legislatif 2019, Peneliti berasumsi bahwa keterpilihan Firdaus tidak hanya bisa dilihat dari kacamata strategi pemenangan maupun marketing politik yang dilakukan oleh kandidat, secara spesifik dari beberapa wawancara secara langsung kepada Firdaus dalam keterpilihan sebagai anggota DPRD Sumbar tidak lepas dalam membangun jaringan politik yang selama ini dibangun oleh Firdaus. Apalagi dengan konsep pemilu yang menggunakan proposional terbuka kandidat tidaklah bersaing dengan kandidat di partai lain, juga bakalan bersaing dengan kandidat lain yang berasal dari tubuh partainya sendiri dan juga dalam kasus ini Firdaus bukanlah petahanan sama sekali.

Upaya meyakinkan konstituen tidak cukup mengejar popularitas ditengah masyarakat, dan popularitas tidaklah dapat serta merta terbangun dengan waktu yang relatif cepat dan singkat. Butuh beberapa platform yang harus dimanfaatkan agar target sasaran bisa mengerti dan mengingat setiap pesan yang disampaikan oleh kandidat terhadap konstituen. Setelah popularitas didapatkan pekerjaan selanjutnya yang harus dilakukan kandidat yaitu membangun sebuah elektabilitas sebagai garansi untuk menetapkan pilihan untuk maju pada pemilihan umum. Jalan untuk mencapai popularitas dan elektabilitas membutuhkan biaya yang

sangat mahal apabila dimulai dengan waktu yang singkat dan tidak pernah memiliki sumber daya yang memadai dalam proses memasarkan diri ke tengah masyarakat.

Apalagi dari hasil sebelumnya diketahui bahwa PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) tidaklah banyak mendapatkan dukungan yang cukup banyak di Sumatera Barat. Sejak dimulainya Pemilihan umum secara langsung perolehan suara PKB tidak banyak untuk bisa menempatkan kader politiknya di parlemen baik di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota maupun kabupaten, sedangkan di DPR RI sama sekali tidak pernah mengirimkan calon legislatifnya di Senayan sampai saat ini.

Hasil dari rekapitulasi final KPU (Komisi Pemilihan Umum) Sumatera Barat PKB mendapatkan kursi DPRD Provinsi sebanyak tiga kursi yaitu dari Dapil IV (Pasaman & Pasaman Barat) satu kursi atas nama Donizar, selanjutnya dari Dapil VI (Dharmasraya, Padang Panjang, Sawahlunto, Sijunjung dan Tanah Datar) satu kursi Atas Nama Rico Alviano Dan khusus di dapil II DPRD Provinsi Sumatera Barat (Padang Pariaman-Kota Pariaman) barulah pada tahun 2019 mengirimkan kadernya untuk bisa menduduki kursi DPRD Sumatera Barat. atas nama Firdaus.

Diantara tiga nama tersebut peneliti lebih melihat ketertarikan kepada Firdaus dikarenakan *background* yang notabane nya sangat berbeda dari kedua kandidat lainnya yang berasal dari kalangan pengusaha, sedangkan Firdaus merintis perjalanan politiknya melalui beberapa aktivitas keorganisasian semenjak dari masa perkuliahan dan akhirnya bergabung ke dalam Partai Kebangkitan

Bangsa pada tahun 2012, berawal dari menduduki ketua sayap partai yaitu Gemasaba Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa.

Calon legislatif itu mempunyai kesempatan besar apabila ada beberapa modal yang dimilikinya, semakin banyak modal yang dipunyai oleh kandidat (bukan hanya *cost*) maka peluang untuk mendapatkan *electoral vote* (suara pemilihan) yang besar semakin terbuka, tapi ini bukan lah suatu masalah yang bisa disimpulkan secara mudah, banyak kompleksitas yang ada dalam proses tersebut. Butuh pematangan strategi dalam proses berburu suara, maka tidak bisa dikatakan hanya sebagai hasil dari salah satu faktor strategi saja, sedangkan kajian yang akan dilakukan pada penelitian kali ini ingin mengeksplorasi jaringan sosial dan politik yang dimiliki kandidat yang kemudian di akumulasikan sebagai bahan acuan dalam menerapkan strategi pemenangan bagi kandidat dan tim kampanye untuk memenangkan pemilihan umum legislatif Dapil II dari Partai Kebangkitan Nasional.

Akan tetapi Pada pemilu 2019, Firdaus dapat dikatakan menggunakan modal finansial yang tergolong minim, tidak lebih Rp. 60.000.000 Firdaus gelontorkan untuk operasional dirinya dan tim sukses selama pemilu. Sumber daya finansial tersebut tidak sepenuhnya dari Firdaus, melainkan dari sahabat-sahabat, senior dan lainnya, baik itu bantuan berupa uang atau barang yang jika di totalkan ada Rp.60.000.000. Alokasi penggunaan dana itu kira-kira rinciannya Rp. 20.000.000, digunakan untuk mencetak dan pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK). Sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai kegiatan sosialisasi mengantar bahan kampanye dari rumah ke rumah

serta akomodasi untuk saksi-saksi di TPS.<sup>2</sup> (Wawancara Singkat dengan Fadli Jamal salah satu tim pemenangan Firdaus).

Keterbatasan dana kampanye yang dimiliki kandidat juga berdampak dalam proses negosiasi terhadap konstituen dikarenakan pemain baru yang khususnya dalam pemilihan umum legislatif 2019 di dapil II Sumatera Barat, dengan cakupan wilayah yang sangat besar ditambah lagi nama baru yang muncul di ranah Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman ini menjadikan pekerjaan rumah yang cukup besar bagi kandidat untuk memasarkan dirinya ketengah masyarakat agar menjadi keterpilihan pada saat pemilihan dilakukan. Berbeda apabila dengan seorang kandidat yang sudah lama dan di kenal oleh tokoh masyarakat, contohnya Mahyeldi dengan dana 200.000.000 Rupiah dapat menghantarkannya ke kursi Gubernur Sumatera Barat,<sup>3</sup> ini adalah sesuatu yang sangat wajar apabila rekam jejak dan periode dia memimpin institusi maupun sudah pernah menjadi kepala daerah di daerah yang notabannya sebagai poros daerah ibukota Sumatera Barat untuk memperkecil *cost* dalam memasarkan pribadinya, banyak Platform yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana promosi agar menjadi instrument kelayakan di tengah masyarakat dan menjadikan sebuah efek elektabilitas yang baik ketika pemilu diadakan.

Selanjutnya temuan yang ditemukan oleh peneliti yaitu salah satu anggota legislatif tahun 2019 atas nama Desrio Putra dari Partai Gerindra dari Dapil I Sumatera Barat mengatakan bahwa dana kampanye saat proses pemilihan umum

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Fadli Jamal ketua Tim Pemenangan DPW PKB Sumatera Barat di Toboh Padang Pariaman. 31 juni 2022

<sup>3</sup> Data didapatkan saat Seminar Proposal melalui komentar Prof Dr Asrinaldi, MSi, di Padang, 28 juni 2022

dilakukan tidak kurang dari 1.000.000.000 dihabiskan,<sup>4</sup> padahal Desrio berasal dari partai yang secara kertas mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Sumatera Barat dengan sosok Prabowo sebagai nilai jual yang luar biasa di tengah masyarakat. Ini menjadi sebuah pertanyaan bagi peneliti bagaimana dengan *cost* sekecil itu di banding dengan beberapa *cost* politik yang dimiliki oleh beberapa anggota legislative tersebut bisa menghantarkan Firdaus menjadi anggota legislatif di di DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Pada pemilu 2019 terdapat juga dinamika politik yang mengakibatkan kekuatan figur bisa tererupsi akibat dinamika politik tersebut, yang sebagaimana kita ketahui makin menguat politik identitas, polarisasi dan populisme mengakibatkan figur harus dapat meyakinkan konstituen untuk dapat memilihnya sebagaimana arus dinamika politik yang teraaminkan di daerah tersebut. Apalagi pada saat itu partai yang menyokong Firdaus sangat terafiliasi dengan pemerintah yang dimana suara Jokowi pada pemilu 2019 sangatlah tergerus di Sumatera Barat akibat dinamika politik sebelum pemilihan serentak dilaksanakan.

Polaralisasi yang disebutkan di atas menimbulkan efek domino baik untuk partai politik maupun calon legislatif, setidaknya gambaran umum suara incumbent pada pemilihan Presiden yaitu Joko Widodo dan Maaruf Amin hanya mendapatkan 407.638 suara dengan persentase 14.09% penduduk Sumatera Barat yang memilih pasangan tersebut. Kenapa hal ini dijelaskan bahwa PKB sebagai partai politik pada saat itu memilih untuk mendukung pasangan tersebut. Dan ini sangatlah berpengaruh pada perolehan suara PKB diparlemen ditambah dengan

---

<sup>4</sup> Wawancara singkat dengan Desrio Putra Anggota Legislatif DPRD Provinsi dari Partai Gerindra, di kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat, 18 November 2022

dinamika yang terjadi pada tahun 2019. Adanya tiga fokus yang harus diketahui oleh kandidat yaitu ideology, *ideologi/person/party*, loyal bukan *mutability* (ketidaktetapan). Kandidat, partai politik dan ideology partai adalah satu kesatuan yang mengikat dan dipromosikan kepada pemilih agar menjadi bahan yang disebut keterikatan yang bisa mewakili satu kesatuan pemilih. Jadi jelas *background* atau partai politik sangatlah memiliki keterikatan yang bisa mempengaruhi masyarakat untuk memilih.

Penelitian yang ingin penulis sajikan lebih menjelaskan bagaimana analisis pemanfaatan jaringan politik Firdaus pada pemilihan umum legislatif 2019 di Sumatera Barat tahun 2019 dari partai PKB. Pada dasarnya setiap calon menggunakan strategi untuk menarik beberapa sumber suara yang dapat mempengaruhi electoral vote baik itu swing voter (suara mengambang) dan core voter (pemilih inti). Adapun pembuatan kerangka/metode sangat diperlukan sebelum melaksanakan strategi dalam mencapai suatu tujuan. Hal ini diperlukan dalam menganalisa kapasitas yang dimiliki pihak pribadi maupun komponen. Jaringan politik tidak serta merta bisa menjadi sebuah bahan dagangan yang bisa menarik simpati masyarakat untuk bisa bersama-sama memiliki kesatuan yang kuat untuk bisa memilih kandidat melalui pesan dari jaringan-jaringan politik yang sudah terbangun sejak lama. Firdaus sendiri tidak lepas dari pengalaman berorganisasi dan sudah membangun jejaring sudah lama. Firdaus juga merupakan tenaga fasilitator desa dalam program percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah tertinggal (P2SEDT) dan tentunya jaringan kelompok pendampingan

tersebut terus dirawat dan dijaga oleh Firdaus sebagai satu instrumen jaringan politiknya pada Pemilu 2019 yang lalu.

Kekuatan partai yang kecil ditengah masyarakat selama proses pemilu dilaksanakan juga sesuatu pekerjaan rumah yang besar bagi kandidat untuk dapat menambah pundi-pundi suara yang ditargetkan baik oleh personal maupun partai. Kepercayaan yang rendah (*low trust*) yang diakibatkan oleh dinamika politik tahun 2019 pastinya akan juga berdampak pada kandidat yang terwakili oleh *background* partai sendiri<sup>5</sup> untuk membangun elektabilitas ditengah upaya kandidat yang juga mengejar popularitas ditengah masyarakat bagaimana efektifitas jaringan politik berdampak kepada politik electoral Firdaus sendiri pada Pemilihan Umum 2019. Dalam hal ini penulis ingin lebih mengkaji strategi pemanfaatan lingkaran jaringan yang digunakan, dan seberapa efektif jaringan tersebut bisa menjadi lumbung yang bisa mengantarkan Firdaus sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut maka pertanyaan penelitian dalam riset ini adalah bagaimana pemanfaatan jaringan politik Firdaus dalam Pemenangannya pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Sumatera Barat?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> PKB bergabung dengan koalisi (Joko Widodo - Maaruf Amin) dimana pada saat itu Jokowi mengalami sebuah degradasi kepuasan maupun suara yang luar biasa dikarenakan dinamika polarisasi, politik identitas, dan populisme Islam ikut mempengaruhi masyarakat Sumatera Barat dalam menentukan pilihan. (Muhtadi, 2019)

- 1) Untuk menjelaskan dan menganalisis Firdaus membentuk jaringan politik pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Sumatera Barat.
- 2) Untuk menjelaskan dan menganalisis pemanfaatan jaringan politik Firdaus pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Sumatera Barat.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap strategi pemanfaatan jaringan politik dalam kemenangan Pemilihan Umum Legislatif. Secara rinci, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap konsep pemanfaatan jaringan politik bagi calon legislatif di tingkat daerah maupun nasional.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang fokus pada jaringan politik sebagai modal sosial dalam keterpilihan calon legislatif pada pemilihan umum.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat penelitian ini diharapkan mampu dipergunakan oleh calon legislatif maupun calon kepala daerah dalam memaksimalkan dan memanfaatkan jaringan politik serta menerapkan strategi yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan potensi suara yang diinginkan oleh calon legislatif maupun calon kepala daerah.